

**PERUBAHAN PARTAI MUSLIMIN INDONESIA, DARI PARTAI  
POLITIK KE ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN  
TAHUN 1968 M-1999 M**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Humaniora (S.Hum) Jurusan Sejarah Peradaban Islam**

**Oleh:**

**ADI WARSITO**

**NIM : 1534200046**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Gagalnya pemberontakan G-30-S/PKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang oleh pendukungnya disebut Orde Baru. Turut berperan umat Islam bersama dengan militer berusaha dengan sekuat tenaga dalam menggagalkan pemberontakan PKI dan melengserkan Soekarno. Runtuhnya Orde Lama tersebut dianggap sangat menguntungkan bagi umat Islam yang sebelumnya termarginalkan oleh kekuasaan Soekarno. Oleh karena itu, lahirnya Orde Baru dianggap sebagai "lampu hijau" bagi para aktivis Masyumi untuk upaya merehabilitasi Masyumi yang telah dibubarkan pada tahun 1960 M. Atau masa rezim Orde Lama (1955-1966 M)

Reaksi para aktivis Masyumi dalam menyambut Orde Baru, dipandang terlalu percaya diri dalam merehabilitasi partai politik yang diidolakan oleh umat Islam. Para aktivis Masyumi tidak melihat bahwa pemerintah Orde Baru dipengaruhi oleh militer. Militer ini adalah *partner* umat Islam dalam meruntuhkan pemerintahan Orde lama.<sup>1</sup> Namun, dalam upaya rehabilitasi Masyumi keduanya sangat bertolak belakang.

Upaya rehabilitasi Masyumi yang dianggap dapat dihidupkan kembali setelah dijatuhkannya dan diberantasnya PKI, ternyata ditolak oleh pemerintah Orde baru. Upaya rehabilitasi didasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa bubarnya

---

<sup>1</sup>Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1991). h. 5

Masyumi merupakan bagian dari gerakan PKI. Sementara itu, pemerintah bersama umat Islam telah berhasil memberantas pemberontakan partai tersebut.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut, logikanya umat Islam dan massa menganggap bahwa rehabilitasi Masyumi adalah suatu keharusan yang logis yang mesti dilakukan pemerintah setelah diberantasnya PKI. Namun, ternyata logika itu tidak berlaku bagi pemerintah khususnya militer untuk kembalinya para aktivis Masyumi dalam sebuah partai politik. Akibatnya, antusias yang begitu besar untuk merehabilitasi Masyumi akhirnya mengalami kegagalan dan kekecewaan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap sikap oposan dan kemahiran berpolitik umat Islam dalam partai Masyumi yang selama ini oleh beberapa kalangan masih memperdebatkan masalah dasar negara .

Dibubarkannya Masyumi menuai kekecewaan yang membuat para aktivis Masyumi mengusulkan untuk mendirikan sebuah kendaraan baru yaitu Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Upaya ini direspon baik oleh umat Islam namun direspon buruk oleh pemerintah. Akhirnya, pemerintah menolak hasil muktamar pertama yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 23 juli 1967 dengan Mohamad Roem (tokoh bekas Masyumi) sebagai ketua PARMUSI. Kemudian, diganti dengan Djarnawi Hadikusumo (Muhamaddiyah) yang direstui oleh pemerintah.

---

<sup>2</sup>Novi Andriawan, Sejarah Politik Islam Indonesia: Studi Kasus Parmusi Tahun 1967-1971, *Skripsi* (Jakarta: Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 3

Kelahiran PARMUSI merupakan hasil embrio dari Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) yang didukung oleh 16 organisasi masyarakat (Ormas).<sup>3</sup> PARMUSI dikukuhkan dan diterima oleh pemerintah pada tahun 1968 secara sah untuk melakukan aktivitasnya sebagai partai politik. Namun, kepengurusan PARMUSI tanpa tokoh bekas Masyumi.<sup>4</sup> Pemerintah Orde Baru benar-benar mengharapkan lahirnya PARMUSI merupakan partai yang benar-benar baru, yang mewakili golongan umat Islam modernis.

Dalam perjalanan selanjutnya pada tahun 1973, pemerintah memberikan kebijakan fusi partai yang mengharuskan partai-partai Islam meleburkan diri dalam suatu wadah yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, golongan Nasionalis dileburkan dalam suatu wadah yang bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ada satu lagi sebuah partai politik yang bernama Golongan Karya (Golkar) yang mendapat dukungan dari pemerintah. Uniknya Golkar enggan untuk menyebut dirinya partai politik. Sebab, istilah partai pada masa itu sedikit buruk citranya bagi rakyat Indonesia.

Setelah fusi, PPP terbagi dalam beberapa golongan organisasi yaitu Serikat Islam (SI) merupakan kelanjutan dari PSII, Muslimin Indonesia (MI) merupakan

---

<sup>3</sup>Enambelas Ormas itu adalah Muhammadiyah, Al-Djamiatul Waslijah, Gabungan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (Gasbiindo), Persatuan Islam, Nahdlatul Wathan, Mathla'ul Anwar, Serikat Nelajan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Ummat Islam (PUI), Al- Ittihadijah, Persatuan Organisasi-Organisasi Buruh Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsjad dan Wanita Islam serta didukung oleh tiga ormas lainnya yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Majelis Seni Budaya Islam (Masbi). Lihat, program kerja PARMUSI tahun 2015-2020.

<sup>4</sup>Abdurahman Syagaf, *Pedoman Dakwah Parmusi*, (Jakarta: Parmusi Center, 2018). H. 38-39

kelanjutan dari PARMUSI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Tarbiyah Indonesia (Perti).<sup>5</sup> Muslimin Indonesia (MI) secara organisasi tidak terstruktur. dan cenderung mengambang karena kurang jelas karakteristiknya. Kelompok ini tidak dapat disebut sebagai kelompok modernis, apalagi tradisional. sebab kegiatan pemikiran dan keagamaannya sama sekali tidak tampak. Beda halnya dengan tokoh-tokoh bekas Masyumi yang kritis dan agamis yang terbukti dalam ucapan dan perbuatannya. Justru MI lebih cenderung mendukung dari apa yang diinginkan pemerintah Orde Baru.<sup>6</sup>

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh pendahulu, kebanyakan menulis persoalan PARMUSI yang berorientasi ke politik, padahal dinamika PARMUSI dari masa Orde Baru sampai Reformasi mengalami perubahan orientasi. Pertanyaan mengenai perubahan yang dialami PARMUSI dalam bidang garapan apakah benar-benar sebuah terobosan baru yang dipandang lebih efektif dan tepat sasaran dalam membina umat Islam, atau karena adanya kejenuhan dan tekanan pemerintah terhadap Islam politik yang dialami MI, sehingga kalangan muda di dalam Muslimin Indonesia<sup>7</sup> menegaskan untuk membentuk sayap baru PPP dan mendeklarasikan diri menjadi Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) yang orientasinya ke dakwah pada tahun 2015.

---

<sup>5</sup>Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1991), h. 60

<sup>6</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 237

<sup>7</sup>Tercatat ada 19 tokoh yang berperan menjadi deklarator Persaudaraan Muslimin Indonesia. Lebih lanjut lihat di Program Kerja Parmusi tahun 2015-2020.

Beberapa uraian di atas menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang Perubahan Partai Muslimin Indonesia. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian atau tulisan yang membahas mengenai PARMUSI sudah lumayan banyak. Namun, dalam kajian PARMUSI yang menitikberatkan tentang metamorfosa dari politik ke dakwah masih sangat sedikit. Padahal PARMUSI jika dilihat dari sejarahnya, PARMUSI merupakan hasil ide pikiran dari tokoh bekas Masyumi yang sangat luwes dalam kegiatan politik. Inilah merupakan alasan penulis yang pertama.

Masih bertahannya PARMUSI di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai sekarang juga menjadi alasan lain. Dinamika PARMUSI yang melampaui beberapa periode sejarah Indonesia perlu diungkap dan dikaji lebih serius. Pengungkapan ini diperlukan agar khalayak dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Apakah benar PARMUSI yang sekarang berorientasi ke dakwah benar-benar sebuah kelanjutan dari partai legendaris yaitu Masyumi, atau hanya argumentasi politik untuk mencari massa! Oleh sebab itu, tema penelitian ini penulis beri judul “PERUBAHAN PARTAI MUSLIMIN INDONESIA, DARI PARTAI POLITIK KE ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN TAHUN 1968-1999 M”

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Batasan masalah dimaksudkan memberikan penjelasan tentang pembatasan secara spasial (berdasarkan tempat) dan temporal (berdasarkan waktu). Pembatasan ini dilakukan agar kajian dapat lebih fokus, sehingga

pembahasannya tidak melebar ataupun menyimpang. Batasan spesial, penelitian ini mengambil wilayah Indonesia (nasional). Sementara itu, secara temporal (waktu) penulis berupaya membatasi perodesasi yaitu pada masa Orde Baru sampai Reformasi yaitu pada tahun 1968- 2015 M.

Pada tahun 1968 M sebagai titik tolak penelitian, karena tahun ini merupakan awal dari berdirinya PARMUSI yang diakui oleh negara berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 70 tahun 1968. Sementara itu, pada tahun 2015 lahirnya paradigma baru PARMUSI dari *political oriented* menjadi dakwah *oriented*, dari awalnya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) berganti Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Dengan mengambil rentan waktu ini, diharapkan dapat mendeskripsikan dinamika Partai Muslimin Indonesia tersebut.

Dengan adanya batasan-batasan tersebut, baik secara temporal maupun spesial, maka penulis diharapkan tidak terjerumus kedalam banyaknya data yang ingin diteliti. Selain itu juga, agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup rumusan masalah yang menjadi fokus kajian.

## **2. Rumusan Masalah**

Secara praktis, beberapa hal tersebut tertuang dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan awal PARMUSI?
2. Bagaimana kiprah PARMUSI dalam politik Orde Baru?

3. Bagaimana perkembangan PARMUSI pada masa Reformasi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menguraikan perkembangan awal Partai Muslimin Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menguraikan kiprah Partai Muslimin Indonesia dalam politik Orde Baru .
- c. Untuk menganalisis dan menguraikan perkembangan Partai Muslimin Indonesia di masa Reformasi.

### **2. Kegunaan**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini dapat bermanfaat atau berguna dalam penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, perkembangan dan sejarah PARMUSI tidak lepas dari pengaruh penguasa. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang selalu merugikan Partai Islam, seperti kebijakan fusi dan kebijakan asas tunggal. Hal demikian membuat tokoh-tokoh muda Islam memiliki pandangan untuk tidak terjun lagi ke politik. Dibuktikan dengan berdirinya Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) yang merupakan kelanjutan dari Partai Muslimin Indonesia.



Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat disebutkan antara lain; *Pertama*, digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Humaniora. *Kedua*, dapat memberikan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan sejarah perpolitikan di Indonesia. *Ketiga*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian terkait PARMUSI.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan hal yang penting dari sebuah penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dengan maksud menghindari duplikasi (plagiasi). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan buku yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Tinjauan pustaka ini untuk memberikan gambaran yang akan menjadi landasan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan membantu penulis dalam menyusun skripsi sebagai berikut:

*Pertama*, Sholichin Salam dalam bukunya yang berjudul *Sedjarah Partai Muslimin Indonesia*. yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Islam pada tahun 1970. Secara khusus buku ini menguraikan tiga sub judul pembahasan. *Pertama*, mengenai latar belakang sejarah, yang menguraikan para aktivis Masyumi dalam upaya rehabilitasi Masyumi. *Kedua*, proses kelahiran PARMUSI yang menguraikan bagaimana upaya memperjuangkan PARMUSI oleh Panitia Tujuh dengan masalah-masalah yang terjadi dengan partai Masyumi. Kemudian yang *ketiga*, berdirinya

Partai Muslimin Indonesia. Menguraikan mengenai Surat dari Badan Koordinasi Amal Muslimin Indonesia dan susunan pimpinan Partai Muslimin Indonesia yang dipimpin oleh H. Djarnawi Hadikusumo sebagai Ketua Umum.

Buku ini belum menguraikan bagaimana proses metamorfosa atau perubahan paradigma PARMUSI. Sebab, Solichin hanya menguraikan latar belakang sejarah, proses kelahiran PARMUSI dan berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

*Kedua*, dalam tulisan Abdurahman Syagaff dalam bukunya yang diberi judul *Pedoman Dakwah Parmusi*. yang diterbitkan oleh Lembaga Parmusi Center pada tahun 2018. Dalam bukunya, menguraikan sekilas sejarah PARMUSI sebagai kelanjutan dari partai besar yaitu Masyumi. Kemudian PARMUSI yang mengikuti kebijakan fusi dari pemerintah bersama-sama dengan partai Islam lainnya melebur menjadi satu dengan sebuah wadah partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, PARMUSI setelah melakukan fusi dengan PPP berkumpul dalam suatu wadah yang bernama Muslimin Indonesia (MI) dan pasca Orde Baru tokoh muda dari MI memutuskan untuk mendeklarasikan Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) tahun 1999. Dan pada tahap selanjutnya sebagaimana judul buku, buku ini menjelaskan dan memberikan panduan bagi para kader-kader PARMUSI dalam mewujudkan cita-cita PARMUSI. Sebagai pedoman buku ini sangat baik untuk rujukan atau referensi bagi penulis untuk menghasilkan sejarah baru.

Dalam buku ini sudah memberikan sebuah referensi untuk penulis mengenai Sejarah PARMUSI berorientasi ke politik dan berorientasi ke dakwah. Namun, penjelasan-penjelasan yang diuraikan masih bersifat umum.

*Ketiga*, Lukman Hakim dalam buku yang berjudul *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito Ketua Umum (Terakhir) Masyumi*. Terdapat empat topik besar yang menguraikan perjuangan Prawoto Mangkusasmito dan Partai Masyumi pada umumnya. Namun, pada bagian ke-3 dengan judul besarnya adalah Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan, pada bagian H, berjudul Dari Rehabilitasi Masyumi ke Partai Muslimin. Berisikan tentang pidato Prawoto Mangkusasmito dalam acara Dewan Partai PARMUSI. Parwoto mengatakan bahwa dalam pembentukan PARMUSI dibentuklah Panitia Tujuh untuk memperjuangkan rehabilitasi Masyumi dan pembentukan partai baru yaitu Partai Muslimin Indonesia. Parwoto mengatakan dengan tegas bahwa Panitia Tujuh adalah bagian dari kesepakatan dari anggota-anggota Masyumi termasuk Parwoto.

*Keempat*, Novi Andriawan dalam skripsinya yang berjudul “Sejarah Politik Islam Indonesia: Studi Kasus PARMUSI Tahun 1967-1971” , jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2007. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejarah Islam Indonesia khususnya yang terjadi pada PARMUSI seperti konflik intern antara golongan pendukung Masyumi dan golongan yang pro dengan pemerintah di tubuh PARMUSI. Dan kemudian mengetahui bagaimana sikap politik pemerintah terhadap PARMUSI. Skripsi ini dengan jelas memberikan batasan temporal dari tahun 1967-1971, artinya penelitian

ini masih fokus terhadap kajian politik yang dimainkan oleh Partai Muslimin Indonesia. Dalam kaitannya PARMUSI yang berorientasi ke dakwah sama sekali tidak dibahas oleh penulis.

*Kelima*, Abdul Salam dalam sebuah jurnal yang berjudul “Bulan Bintang di Bawah Kuasa Beringin: PARMUSI Padang Pariaman Masa Orde Baru”, diterbitkan oleh *Jurnal SOCIUS* tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kiprah PARMUSI dalam pemilu 1971 yang banyak intrik dibawah pengaruh Golkar sebagai partai pemerintah masa itu. Penulisan ini difokuskan dalam empat uraian pokok, *Pertama*, menguraikan tentang awal lahirnya Orde Baru yang tak lepas dari peran Umat Islam dan militer. *Kedua*, Proses berdirinya PARMUSI menguraikan dari usulan rehabilitasi hingga finalnya disetujui lahirnya PARMUSI pada tahun 1968. *Ketiga*, Intervensi pemerintah dalam PARMUSI Padang Pariaman menguraikan pemantauan gerak-gerik PARMUSI Padang Pariaman dalam setiap rapat dan kegiatannya. *Keempat*, Kiprah PARMUSI Padang Pariaman dalam Pemilu 1971, menguraikan usaha PARMUSI dalam mengikuti Pemilu dan intervensi pemerintah dengan menggerakkan Intel Polres Padang Pariaman dan Pelaksana Khusus Daerah (Lasusda).

Dalam tulisan tersebut penulis belum menyinggung mengenai perkembangan PARMUSI pada masa selanjutnya. Sebab, dalam tulisan tersebut lebih memfokuskan pada PARMUSI di wilayah Padang Pariaman dalam mengikuti pemilu tahun 1971. Upaya-upaya pemerintah sangat terlihat dalam melakukan intervensi terhadap partai Islam PARMUSI.

Dari telaah tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan buku yang membahas mengenai PARMUSI sudah banyak. Namun, belum ada yang membahas secara khusus mengenai “PERUBAHAN PARTAI MUSLIMIN INDONESIA, DARI PARTAI POLITIK KE ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN TAHUN 1968-1999 M” Hal ini sangat menarik ketika PARMUSI mengalihkan paradigma dan garapannya dalam kerangka perjuangan Islam, sehingga ada sebuah kekosongan penelitian. Oleh sebab itu, inilah yang mendasari pemikiran penulis untuk melakukan proses penelitian lebih lanjut.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. mempelajari dan memahami gerak sejarah Partai Muslimin Indonesia pada masa Orde Baru samapi Reformasi. Teori-teori yang relevan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti perlu dicantumkan. Terkait dengan perubahan yang dialami oleh PARMUSI dalam bidang orientasi yang di awal kelahiran menitik beratkan kepada politik (Orde Baru). Namun, setelah terjadinya peralihan dari masa Orde Baru ke Reformasi PARMUSI memilih untuk mendasari perjuangannya di bidang Sosial.

Perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang wajar, karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan tampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru.

Setiap perkembangan zaman, perubahan tentu akan terus terjadi. Efek yang akan ditimbulkan dari sebuah perubahan adalah efek yang positif ataupun negatif. Perubahan yang berefek positif adalah perubahan yang terjadi kearah kemajuan suatu keadaan. Namun, perubahan yang negatif menuju perubahan kearah suatu yang merugikan.

Sedangkan menurut Nanang Martono (2012) bahwa perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Sedangkan, aspek yang luas dapat mencakup berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dimasa yang akan datang.

Dalam kenyataannya masyarakat memang tidak pernah diam, masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika tersebut terjadi bisa karena faktor internal yang melekat pada diri itu sendiri, dan bisa karena faktor lingkungan eksternal.

Teori sosiohistoris merupakan teori yang menempatkan variabel latar belakang sejarah dengan menekankan proses evolusi sebagai faktor penting terjadinya sebuah perubahan. Perubahan sebagai suatu siklus karena sulit untuk diketahui ujung pangkal penyebab awal terjadinya perubahan sosial. Perubahan yang terjadi lebih merupakan peristiwa prosesusual dengan memandang sejarah sebagai serentetan lingkaran yang tak berujung. Ibnu Khaldun, salah satu teoretisi sosiohistoris mengemukakan bahwa perubahan itu merupakan suatu siklus, yang analisisnya menfokuskan pada bentuk dan tingkat pengorganisasian kelompok dengan

latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Model perubahan sosial sebagai siklus umumnya banyak dianut masyarakat di kawasan timur, terutama cina, termasuk Indonesia, daripada Barat.<sup>8</sup>

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang direncanakan secara sistematis untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal maupun internal untuk mencapai sasaran baru. Teori Kurt Lewin (1951) mengatakan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi tiga tahapan. *Pertama*, tahap *Unfreezing* (pencarian) Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan mengubah terhadap keseimbangan yang ada. *Kedua*, tahap *Moving* (bergerak). Proses perubahan ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi serta sikap dan kemampuan untuk berubah. *Ketiga* Tahap *Refreezing* (Pembekuan). Tahap ini dimana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru.<sup>9</sup>

Jika dikitikan dengan teori sosiohistoris dan teori Kurt Lewin tersebut maka, masalah yang telah terjadi pada PARMUSI diharapkan bisa diungkap, berdasarkan dua teori tersebut adalah teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>8</sup>J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 378-379.

<sup>9</sup><https://www.scribd.com/doc/178564865/TEORI-KURT-LEWIN-docx> diakses pada tanggal 27-05-19, pada pukul 10:03 WIB

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi atau “*Science of Methods*” yakni ilmu yang membicarakan jalan,<sup>10</sup> dengan menggunakan metode maka sejarawan dapat melakukan kegiatan penelitian secara terarah.<sup>11</sup> metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknik.<sup>12</sup> Sementara makna penelitian menurut Florence M. A. Hilbish adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori. Oleh karena itu, metode sejarah dalam pengertiannya yang umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahan dari perspektif hoistorik.<sup>13</sup> Penelitian ini adalah mengenai “PERUBAHAN PARTAI MUSLIMIN INDONESIA, DARI PARTAI POLITIK KE ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN TAHUN 1968-1999 M” Keseluruhan prosedur metode sejarah dapat dicapai melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (*Heuristik*), kritik dan seleksi sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (*Historiografi*).

---

<sup>10</sup>Dudung Abdurracman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 103

<sup>11</sup>Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat Dan Iptek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 17.

<sup>12</sup>A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 83.

<sup>13</sup>Dudung Abdurracman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 103



Tahap pertama adalah pemilihan topik, pada tahap pemilihan topik ini sebaiknya peneliti menentukan berdasarkan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>14</sup> Tahap kedua adalah pengumpulan data (*Heuristik*), sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua hal. *Pertama* sumber setempat dan sezaman. Wujudnya adalah buku yang sezaman, dokumen, wawancara lisan dan foto-foto.

*Kedua*, sumber tidak sezaman yang berupa hasil-hasil penelitian berupa buku-buku terkait, skripsi, dan jurnal. Sumber-sumber ini sering disebut dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada data sejarah perkembangan Partai Muslimin Indonesia Tahun 1968 M-1999 M. Kemudian menggunakan pendekatan sejarah. Sementara itu, dalam kegiatan pengumpulan data, penelitian mencari dan mengumpulkan beberapa sumber data yang diperoleh dari Perpustakaan Daerah (Pusda), Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan PARMUSI dan buku-buku milik pribadi. Setelah data terkumpul dan diseleksi, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data tersebut dan menghubungkan masing-masing data untuk dianalisis menurut isinya.

Pada tahap ketiga dalam penelitian sejarah diperlukan kritik sumber (verifikasi). Verifikasi adalah langkah untuk mengkritik atau mengecek data yang telah berhasil dikumpulkan. Untuk memperoleh data secara maksimal, semua data yang diperoleh ditelaah dan dikritik langsung oleh penulis. Data yang telah diperoleh

---

<sup>14</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), h. 90

dianalisis dengan cermat, sehingga data yang dianggap memiliki kesenjangan karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran dari narasumber maupun pengarang buku dapat diambil jalan tengah untuk mencari kebenaran ilmiah.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, sejarawan diharapkan tidak memihak pada pendapat orang lain atau bersifat subjektif. Sejarawan dituntut untuk bersifat adil terhadap argumen-argumen tersebut.

Selanjutnya, pada tahap keempat, sumber-sumber yang telah didapat dianalisis dan ditafsirkan (Interpretasi). Analisis adalah memilah-milah sumber sejarah, sehingga ditemukan data-data sebagai informasi yang sebenarnya. Interpretasi merupakan menafsirkan atau memberikan makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Selain itu, upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau.<sup>16</sup> Dari berbagai fakta yang telah diperoleh melalui sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian dirangkai agar mempunyai struktur. Interpretasi ini dilakukan untuk mendapatkan penafsiran data yang jelas. Data yang telah diperoleh dari beberapa tempat, baik itu dari dokumentasi, arsip, perpustakaan yang ada di Palembang, dan hasil wawancara.

Langkah penelitian yang terakhir adalah merangkai penyatuan masa silam yang telah disintesis selanjutnya ditulis dalam bentuk kisah sejarah menjadi tulisan sejarah yang sering disebut historiografi. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis maka, ia mengarahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan

---

<sup>15</sup>A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 65.

<sup>16</sup>A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 81-83.

teknis penggunaan catatan-catatan atau kutipan terutama penggunaan kata yang kritis sehingga menghasilkan penulisan sejarah yang utuh.

Dalam penulisan sejarah, penulis berusaha merekonstruksi peristiwa-peristiwa di masa lalu, dengan cara menulis ulang, sejarah ditulis ulang bukan karena peristiwa-peristiwa masa lalu berubah, suatu hal yang mustahil karena peristiwa sejarah itu sendiri telah berlangsung dan hanya sekali. Sejarah ditulis kembali bukanlah dengan maksud untuk memutar-balikkan pemeran-pemeran meskipun bukan mustahil dapat juga terjadi subjektivitas atau penulisan yang memihak. Penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin dalam bentuk deskripsi, narasi, dan analisis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terbagi dalam lima bab. Bab Pertama, merupakan sebuah pengantar (Introduksi) yang memberikan landasan umum dalam kaitannya dengan penelitian ini. Biasanya, introduksi ini meliputi: latar belakang masalah, yang menguraikan alasan-alasan penulis untuk menekankan bahwa perlunya topik tersebut untuk penelitian dilakukan, memperhatikan lingkup dan skop penelitian yang memberi batasan-batasan permasalahan dan lingkup kajian yang diteliti, yang diwujudkan dalam beberapa bentuk pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, yang menjelaskan sasaran akhir dari penelitian ini, tinjauan pustakan untuk meninjau dan menelaah hasil penelitian yang setopik penelitian terdahulu dan mencari aspek-aspek atau sisi lain yang belum diungkap dalam penelitian terdahulu;

kerangka teori, yang digunakan untuk memberi wadah berfikir dalam menganalisis persoalan tersebut; metode penelitian, yang merupakan sarana-sarana yang digunakan untuk menuju titik persoalan; dan sistematika penulisan, yang merupakan urutan-urutan yang akan dianalisis sehingga persoalan tersebut dapat dibahas secara beraturan.

Bab Kedua, menguraikan tentang Sejarah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Hal ini perlu diungkap untuk melihat Latar Belakang Berdirinya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) yang diperjuangkan untuk menampung aspirasi umat Islam khususnya Islam modernis. Kemudian melihat Berdirinya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dan Perkembangan PARMUSI Pada Tahun 1968-1973 M. perkembangan Parmusi selanjutnya.

Bab Ketiga, membahas tentang Fusi Dan Kebijakan Orde Baru Terhadap Politik Islam, 1973 M -1998 M. Hal ini perlu diungkap untuk melihat masalah-masalah yang menghambat PARMUSI seperti Kebijakan Peleburan Partai Politik yang menyebabkan PARMUSI melebur dalam suatu wadah yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari sini terlihat peran atau kiprah PARMUSI serta menguraikan Prinsip Perjuangan PPP.

Bab Keempat, melihat proses metamorfosa PARMUSI dari politik oriented ke dakwah oriented. Bab ini menfokuskan pada tuntutan perubahan dan akhirnya Parmusi sebagai organisasi Masyarakat.

Bab Kelima, adalah penutup. Semua uraian di atas akan disimpulkan dalam bagian ini. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang

dirumuskan dalam perumusan masalah. Selain itu, bagian ini merupakan bentuk refleksi teoritis dari hasil penelitian. Dalam bab inilah penulis memberi beberapa rekomendasi tentang langkah umat Islam selanjutnya.